

De-Coupling Games: Peran Multi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Luwu Utara

Yana Seftiyana ^{1*}; Alwi ²

^{1,2} Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; yanaseftiyana123@gmail.com ; alwi@unhas.ac.id

* Correspondence : yanaseftiyana123@gmail.com

ABSTRAK

Ketahanan pangan sebagai isu global yang kompleks memerlukan interaksi yang difasilitasi oleh strategi manajemen jaringan pada level *network*. Pemisahan strategi sebagai salah satu bentuk strategi manajemen jaringan yang memfasilitasi interaksi antar aktor pada level *network* menunjukkan adanya kepentingan yang berbeda setiap aktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran multi-aktor dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan konsep *de-coupling games*. Aktor-aktor yang terlibat yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kepentingan tersebut diatur melalui strategi terpisah namun terkoordinasi dalam mencapai ketahanan pangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sinergi dan interaksi antara berbagai aktor memainkan peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, distribusi, akses, dan konsumsi pangan. Program-program seperti Lumbung Pangan dan Perkarangan Pangan Lestari membantu meningkatkan keamanan pangan di Kabupaten Luwu Utara. Pemisahan strategi ini menciptakan efisiensi dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan, yang dibuktikan dengan peningkatan indeks ketahanan pangan Kabupaten Luwu Utara.

Kata kunci : *Aktor, De-Coupling, Kebijakan, Ketahanan, Pangan*

ABSTRACT

Food security as a complex global issue requires interaction facilitated by network management strategies at the network level. Separation of strategy as a form of network management strategy that facilitates interaction between actors at the network level shows that each actor has different interests. This study aims to analyze the role of multi-actors in the implementation of food security policies in North Luwu Regency using the concept of *de-coupling games*. The actors involved are the government, private sector, and community, who have different interests. These interests are regulated through separate but coordinated strategies in achieving food security. The study used a qualitative approach with interview, observation, and documentation techniques. The results of the study showed that synergy and interaction between various actors play an important role in realizing food security by increasing the availability, distribution, access, and consumption of food. Programs such as Lumbung Pangan and Perkarangan Pangan Lestari help improve food security in North Luwu Regency. This separation of strategies creates efficiency in the implementation of food security policies, as evidenced by the increase in the food security index of North Luwu Regency.

Keywords : *Actor, De-Coupling, Food, Policy, Security*

Pendahuluan

Kompleksitas hubungan antara multi aktor atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan merupakan saling ketergantungan. Saling ketergantungan dapat ditunjukkan melalui proses interaksi aktor dalam jaringan, yang menunjukkan kompleksitas dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik (Torfing et al., 2012). Para aktor memiliki kepentingan yang beragam untuk menyelesaikan permasalahan, yang menimbulkan saling ketergantungan interaksi yang intensif dalam jaringan. Kompleksitas interaksi dalam menyelesaikan atau memecahkan persoalan perlu dikelola dengan manajemen jaringan (*network management*) untuk mencapai *common goals* dalam mengimplementasikan kebijakan (E. H. Klijn & Koppenjan, 2016).

Klijn dan Koppenjan (2016) mengemukakan bahwa *network management* merupakan sebuah strategi yang disengaja, yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mengarahkan sebuah interaksi, dan atau mengubah fitur jaringan dengan tujuan untuk memajukan kolaborasi dalam proses jaringan (E. H. Klijn & Koppenjan, 2016). *Network management* dapat dianggap sebagai bentuk strategi koordinasi antara multi aktor dengan kepentingannya terkait ukuran kebijakan tertentu (Voets & De Rynck, 2011). Strategi-strategi dalam *network management* dapat diterapkan pada level *game* dan level *network*. Strategi-strategi tersebut memiliki tujuan untuk memengaruhi interaksi dan persepsi antar aktor dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan (Kickert et al., 1997). Jaringan dan *game* (permainan) memiliki hubungan erat (Klijn et al., 1995), sehingga serangkaian interaksi yang terjadi seputar isu kebijakan dapat dikatakan sebagai *game* (permainan) (Crozier & Friedberg, 1980; Rhodes, 1981; Scharpf, 1997).

Ketahanan pangan merupakan isu global, nasional, maupun lokal yang kompleks (Rukmana et al., 2021). Respon yang berbeda seringkali muncul di antara aktor-aktor yang terlibat, baik di waktu yang sama maupun di waktu yang berbeda (Alwi, 2022). Manajemen strategi untuk memfasilitasi interaksi antar aktor dalam jaringan pada level *network* salah satunya adalah *de-coupling games* (pemisahan strategi). Konsep ini dikenalkan oleh Kickert, Klijn, dan Koppenjan dalam tata kelola. Keputusan atau respon yang dibuat oleh salah satu pihak dapat memengaruhi pihak lain tanpa adanya kontrol secara langsung atau ketergantungan di antaranya. Konsep *de-coupling games* menekankan interdependensi antara aktor-aktor tersebut tidak selalu terjadi secara langsung atau linier, melainkan melalui mekanisme yang kompleks dan tidak langsung (Kickert et al., 1997).

Proses interaksi antar aktor menunjukkan saling ketergantungan, tetapi tidak secara langsung pada interdependensi atau pemisahan strategi aktor. Kolaborasi atau koordinasi antara *stakeholders* menuntut adanya sinergitas antar aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (Rukmana et al., 2021). Peran multi aktor dalam mewujudkan ketahanan pangan memerlukan sinergitas yang sistematis untuk mencapai ketersediaan pangan (Azhar et al., 2023).

Ancaman krisis pangan yang semakin nyata mendesak pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan kedaulatan pangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Kebijakan ketahanan pangan di Indonesia dilakukan dengan melibatkan lintas sektor. Hal tersebut dikarenakan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses

pangan secara makro, meso, dan mikro; tercukupinya kualitas keragaman dan keamanan pangan; dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki hasil sektor pertanian yang melimpah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan pada bulan Februari 2023 tercatat sebanyak 40,69 juta orang atau 29,36 persen dari total pekerja. Berdasarkan data *Global Food Security Index (GFSI)* 2023, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan di angka 60,2 atau meningkat sebesar 1,7 persen dari tahun sebelumnya. Angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-63 dari 113 negara. Hal ini diukur dengan empat indikator, yaitu keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi, serta keberlanjutan dan adaptasi. Secara umum, dari sisi keterjangkauan dan harga pangan di Indonesia dinilai cukup baik. Namun, beberapa indikator lain seperti ketersediaan pasokan, kualitas, dan keamanan serta keberlanjutan dan adaptasi pangan masih dinilai lemah (Pransuamitra, 2023).

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memenuhi ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan di daerahnya. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu penyumbang dan penyangga pangan nasional. Berdasarkan peringkat Indeks Ketahanan Pangan tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat ke-2 dengan skor 81,38. Sedangkan, pada tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan turun pada posisi ke-4, dengan kenaikan skor sebesar 83,36. Hal ini menunjukkan kenaikan Indeks Ketahanan Pangan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada bobot skornya. Luwu Utara merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki Indeks Ketahanan Pangan cukup baik di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara berada di peringkat ke-9 di Sulawesi Selatan dan peringkat 128 di Indonesia dengan skor 80,27 pada tahun 2022. Sedangkan, pada tahun 2023 Luwu Utara berada di peringkat ke-12 di Sulawesi Selatan dan naik menjadi peringkat 101 dengan skor 83,03.

Ketersediaan dan distribusi pangan melalui produktivitas dan produksi pangan berkelanjutan merupakan target dari kebijakan ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan memiliki wewenang dalam hal ini. Produksi pangan dan pertanian yang berkelanjutan menjadi salah satu fokus SDGs. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan peningkatan kinerja sumber daya dan membangun sinergitas antar *stakeholders* (pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat). Isu-isu dan permasalahan yang terjadi pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yaitu stok cadangan pangan daerah belum dalam jumlah ideal, *update* dan sinkronisasi data *base* ketersediaan dan distribusi pangan yang lambat.

Konsumsi dan keamanan pangan di Kabupaten Luwu Utara juga menjadi fokus Pemerintah Daerah, melalui penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Kabupaten Luwu Utara meluncurkan program "Getar Dilan" sebagai inovasi ketahanan pangan yang merujuk pada kondisi faktual masyarakat, yang memenuhi kebutuhan sayuran dengan membeli di pedagang keliling (KemenPANRB, 2023). Peningkatan keamanan pangan dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, ataupun penyuluhan kepada masyarakat dan kelembagaan petani. Kelembagaan petani seperti Kelompok Wanita Tani memiliki peran dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjamin keamanan pangan.

Penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat, koordinasi, dan strategi aktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Penelitian oleh (Alwi & Susanti, 2021) menunjukkan bahwa program publik sering kali tidak efektif karena strategi aktor, serta menekankan bahwa instrumen kebijakan penting untuk keberhasilan program. Keterlibatan masyarakat, dukungan, dan teknologi dengan adanya koordinasi dengan instansi menjadi sebuah prioritas (Taufik et al., 2021). Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk optimalisasi potensi desa melalui pertanian berkelanjutan ditunjukkan pada penelitian (Adhila Amalia et al., 2022).

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh (Apriyanto et al., 2023) menunjukkan adanya upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong keikutsertaan kelembagaan petani dan swasta dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir. Kolaborasi multi aktor sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan, di mana pemerintah memainkan peran sebagai kunci dalam pengelolaan pangan (Azhar et al., 2023). Kepercayaan, *sharing* informasi, dan penyebaran sumber daya di antara aktor menjadi kunci koordinasi jaringan tata kelola dalam mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan (Agustian et al., 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa keterlibatan peran multi aktor, koordinasi, dan strategi aktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Pemisahan strategi yang terkoordinasi untuk mengelola kepentingan setiap aktor dapat memberikan fokus terhadap peran, serta meningkatkan implementasi kebijakan ketahanan pangan yang efektif dan efisien. Sehingga, peneliti melihat bahwa adanya *research gap*, yaitu belum ada yang berfokus membahas terkait pemisahan strategi atau *de-coupling games* pada peran multi aktor dalam mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan. Selain itu, pada penelitian terdahulu juga belum disajikan dampak ekonomi, penguatan kapasitas kelembagaan petani, dan interaksi kolaborasi/ koordinasi multi aktor.

Peran multi aktor baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Setiap aktor memiliki strategi atau *coupling* dalam mengimplementasikan kebijakan. Pemisahan strategi ini memungkinkan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara menjadi lebih responsif, adaptif, dan memperkuat koordinasi dalam menghadapi tantangan kompleks ketahanan pangan. Oleh karena itu, peran multi aktor dengan strategi atau kepentingannya masing-masing menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk mengangkat topik ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran multi aktor dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini berfokus pada pemisahan strategi atau *de-coupling games* pada peran multi aktor dalam mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara. Kontribusi penelitian ini adalah menghadirkan konsep *de-coupling games* pada peran multi aktor sebagai kebaruan dalam implementasi kebijakan, serta memberikan wawasan mendalam mengenai pemisahan strategi multi aktor yang dapat diadopsi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan koordinasi dalam implementasi kebijakan publik di daerah lain, dan sebagai pengembangan penelitian selanjutnya.

Metode

Subjek penelitian ini adalah aktor yang berinteraksi dalam mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara, yaitu pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Subjek penelitian merupakan sumber informasi dalam hal ini informan

penelitian. Informan penelitian pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Kepala Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kepala Bidang Penyuluhan, Penyuluh Pertanian Lapangan, dan Kelompok Wanita Tani.

Jenis penelitian atau pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu atau sekelompok orang (Creswell, 2013). Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti, karena peneliti bermaksud untuk mencari tahu secara mendalam peran multi aktor dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara dengan konsep *de-coupling games*.

Batasan objek penelitian ini berfokus pada pemisahan strategi setiap aktor dalam melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara bersama informan penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari data BPS, artikel, buku, internet, dan dokumentasi. Data penelitian kualitatif didapatkan melalui berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbagai macam (triangulasi), dan secara terus menerus dilakukan sampai datanya bersifat jenuh. Miles and Huberman yang mengungkapkan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif itu dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas dan datanya sudah jenuh (Milles et al., 2014). Analisis data pada penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/ verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Aktor dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

De-coupling games atau pemisahan strategi sebagai permainan yang ada pada struktur jaringan dengan melibatkan pemisahan efek fungsi dan kendala bersama dari aktor jaringan untuk memahami bagaimana strategi tersebut dapat tumbuh dan berinteraksi dalam struktur jaringan (Sorrentino & Mecholsky, 2011). Konsep *games* ini merujuk pada dinamika interaksi antar aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan ketahanan pangan. Aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan ketahanan pangan memiliki kepentingan yang beragam. Sehingga dinamika ini dapat menimbulkan persaingan, konflik, atau kerja sama strategis dalam mencapai tujuan mereka. Berikut pemisahan strategi pada peran multi aktor dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara.

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan memisahkan strategi dalam mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan dengan berfokus pada ketersediaan, distribusi, akses, konsumsi, dan keamanan pangan. Setiap aktor yang berkepentingan memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak saling tumpang tindih kepentingan antara setiap aktor. Hal ini disampaikan oleh Ibu MM selaku Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, yaitu:

“Terkait kepentingan kita ada tupoksi, jadi tidak saling masuk, saling tidak mengganggu kegiatan di bidang lain” (Hasil Wawancara, 29 Juli 2024).

Ketersediaan, distribusi, dan akses pangan di Kabupaten Luwu Utara ditunjukkan dengan adanya program Lumbung Pangan. Ibu SY selaku Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyampaikan:

“Seperti cadangan pangan ada di lima lumbung. Saat banjir atau bencana CPP ini yang di lumbung buat cadangan pangan” (Hasil Wawancara, 29 Juli 2024).

Program lumbung pangan yang ada di Gabungan Kelompok Tani dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan pangan khususnya beras. Program lumbung pangan di Kabupaten Luwu Utara sebagai program pemerintah untuk memenuhi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Program ini hadir sejak akhir tahun 2021 yang dihibahkan dalam bentuk bantuan tempat penjemuran padi atau pengering padi, gilingan padi, dan gudang di lima Gabungan Kelompok Tani. Selain untuk memudahkan akses masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan, program ini juga dimaksudkan untuk menjaga dan memenuhi ketersediaan pangan, mengantisipasi kerawanan pangan ketika ada bencana alam.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam memenuhi Cadangan Pangan Pemerintah, yaitu dengan memberikan bantuan beras kepada masyarakat. AR selaku Plt. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan menyampaikan:

“salah satunya kita membangun kerja sama dengan Bulog juga Gapoktan. Kalau Bulog ini masalah GPM dan juga bantuan pangan” (Hasil Wawancara, 30 Juli 2024).

Program ini bekerja sama dengan Bulog dalam menyediakan beras untuk masyarakat sebanyak 10 Kilogram per Rumah Tangga yang terdaftar pada masyarakat kurang mampu. Pentingnya integrasi dan interaksi dengan instansi lain dalam hal ini, agar bantuan dapat tersalurkan dengan efektif dan tepat sasaran. Program Gerakan Pangan Murah juga bagian dari strategi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kebijakan ketahanan pangan. Program Gerakan Pangan Murah dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Luwu Utara, khususnya jika menjelang dan pasca libur Natal dan tahun baru.

Strategi dalam memenuhi konsumsi dan keamanan pangan di Kabupaten Luwu Utara dengan peningkatan pekarangan sebagai lahan tanam sayuran untuk menjamin keamanan dan akses pangan lebih terjangkau. Ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara juga diwujudkan melalui penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Penganeekaragaman atau diversifikasi pangan di Kabupaten Luwu Utara mencakup upaya untuk meningkatkan variasi jenis makanan atau pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Penganeekaragaman pangan di Kabupaten Luwu Utara dengan meningkatkan dan mengembangkan Sagu sebagai bahan pangan. Konsumsi Sagu di Kabupaten Luwu Utara memiliki potensi yang besar. Konsumsi Sagu sebagai bentuk penganeekaragaman bahan pangan mencapai 7 Kilogram per Kapita setiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan oleh Hayati et.al, 2014 menunjukkan bahwa 20,83% responden mengonsumsi sagu karena faktor kebiasaan. Mayoritas masyarakat Kabupaten Luwu utara memang menyukai makan sagu, 74,17% menyatakan suka makan sagu (Hayati et al., 2014).

Tabel 1. Data Peningkatan PPH Ketahanan Pangan Luwu Utara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
PPH Konsumsi	92,90	92,93	100
PPH Ketersediaan	87,88	87,88	100

Sumber: Data LAKIP Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023

Peningkatan PPH Konsumsi dan PPH Ketersediaan merupakan salah satu sasaran dari RPJMD Luwu Utara. Berdasarkan data di atas, meningkatnya ketahanan pangan merupakan keberhasilan pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Luwu Utara. Data PPH ini dapat dimanfaatkan oleh instansi lain yang ada di Luwu Utara untuk menentukan kebijakan yang serupa atau terkait lainnya.

Kebijakan ketahanan pangan juga tidak terlepas dari adanya peran kelembagaan petani seperti Kelompok Tani atau Kelompok Wanita Tani. Kelembagaan petani sebagai aktor yang berperan mengimplementasikan kebijakan secara langsung baik sebagai objek dan juga pelaku. Kelembagaan petani dalam hal *de-coupling games* atau pemisahan strategi ini berfokus pada peningkatan sumber daya. Peningkatan sumber daya dilakukan dengan terus melakukan koordinasi dan interaksi dengan pemerintah yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan maupun pihak swasta.

Program Pekarangan Pangan Lestari sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan akses, ketersediaan, dan pemanfaatan pangan untuk menjamin keamanan konsumsi pangan dalam rumah tangga. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang mana Kelompok Wanita Tani sebagai pelaku di lapangan. Adanya program ini dapat meningkatkan perekonomian ibu-ibu rumah tangga dan juga menjamin keamanan serta gizi pangan. Hal ini disampaikan oleh Ibu SF selaku Ketua Kelompok Wanita Tani Sumber Mulya, yaitu:

“Hasil dari sayuran yang kita tanam itu bisa dibuat keripik kayak keripik pare, itu kita jual di warung-warung, hasilnya buat kas kelompok. Selain itu juga kan dengan kita menanam sendiri, kita tidak perlu lagi menunggu tukang sayur, bisa hemat juga. Sayurannya juga bisa kita jual ke tukang sayur” (Hasil Wawancara, 7 Agustus 2024).

Program P2L ini juga dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini petani, untuk membuat pupuk organik dari kulit buah atau sayuran yang sudah busuk, dan juga dari kotoran hewan. Hal ini disampaikan oleh Ibu S selaku Ketua Kelompok Wanita Tani Mawar, yaitu:

“Kita memanfaatkan sumber daya lingkungan, seperti buat pupuk dari kohe dan kulit buah-buahan untuk pupuk cair, supaya lebih aman dikonsumsi” (Hasil Wawancara, 7 Agustus 2024).

Pendampingan dan penyuluhan kepada Kelembagaan Petani dilakukan oleh pihak pemerintah yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan, sebagai *street level bureaucracy*. Peran PPL di sini berfokus pada upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, penyuluhan, dan sekolah lapang. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak A selaku Kepala Bidang penyuluhan, yaitu:

“Mereka kan di sana ada pelatihan, ada beberapa metode yang dilakukan, ada sekolah lapang” (Hasil Wawancara, 5 Agustus 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu NS selaku tim Penyuluh Kecamatan yaitu:

“Kalau ibu-ibu KWT kami ada pertemuan, kita melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait budidaya sayuran, bahkan pelatihan sampai pasca panen untuk pengolahan hasil” (Hasil Wawancara, 2 Agustus 2024).

Upaya ini sebagai bagian dari mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Kerja sama antara PPL dengan kelembagaan petani menjadi kunci dalam meningkatkan kemampuan petani dalam budidaya dan peningkatan produktivitas pangan. Pertanian berkelanjutan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan, sehingga kelembagaan petani perlu ditingkatkan sumber dayanya.

Keberlangsungan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan tidak terlepas dari adanya kemudahan akses pupuk. Kemudahan dan ketersediaan pupuk ini difasilitasi oleh pihak swasta. Pemerintah Daerah memberikan subsidi pupuk kepada petani. Namun, bantuan pupuk bersubsidi ini hanya bisa dinikmati oleh kelompok tani. Pengambilan pupuk subsidi melalui sejumlah aturan, dengan membawa Kartu Tanda Penduduk. Penyuluh Pertanian Lapangan dalam hal ini memfasilitasi kelompok tani untuk mengisi Rencana Definitif Kebutuhan Keluarga (RDKK). Pupuk yang akan diambil oleh petani sudah ada tercantum sesuai luas lahan pertaniannya. Mitra toko tani sebagai pihak swasta dalam hal ini berperan sebagai agen yang memastikan bantuan pemerintah tersalurkan dengan efektif dan tepat sasaran.

Hasil pembahasan di atas menunjukkan interaksi multi aktor dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara dapat dimanfaatkan secara efektif, yang menunjukkan interdependensi dan saling ketergantungan tanpa tumpang tindih peran masing-masing aktor. Sinergitas antar aktor dalam mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat dari tercapainya Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencapai 100%. Aktor berfokus pada peran, tugas, dan fungsinya masing-masing dengan tetap berinteraksi dan berkoordinasi. Konsep *de-coupling games* dalam hal ini dapat membantu keberhasilan peran multi aktor dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara.

2. Analisis De Coupling Games Peran Multi Aktor

Konsep *de-coupling games* yang muncul dalam interaksi antar aktor yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara menyoroti adanya pemisahan strategi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan menggarisbawahi pentingnya penganekaragaman pangan dan keamanan pangan dalam upaya untuk mendukung ketahanan pangan. Pemantauan kualitas pangan, pengujian pestisida, dan upaya penganekaragaman pangan merupakan langkah konkrit untuk memastikan ketersediaan pangan yang aman dan beragam.

Dinas Pertanian berfokus pada peningkatan produktivitas dan pelatihan petani. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani untuk mendukung ketahanan pangan melalui pertanian yang berkelanjutan. Penganekaragaman tanaman, pelatihan, maupun pendekatan lokal dalam mendukung ketahanan pangan sebagai penerapan *de-coupling games actor*. Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani menunjukkan adanya peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara. Penerapan *de-coupling games* dalam hal penganekaragaman tanaman, pangan, pemanfaatan sumber daya lokal, dan pendampingan petani menunjukkan kolaborasi dan interaksi yang efektif dalam jaringan kebijakan ketahanan pangan di Luwu Utara.

Transparansi pendistribusian pupuk bersubsidi menjadi bagian *de-coupling games* mitra toko tani sebagai pihak swasta. Mitra toko tani sebagai agen atau pengecer pupuk bersubsidi berfokus pada pentingnya keterbukaan, ketepatan, dan keadilan dalam penyaluran pupuk subsidi kepada kelompok tani di Luwu Utara. Upaya untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan transparan melalui proses verifikasi yang ketat. Hal ini menunjukkan keterlibatan aktor swasta dalam mendistribusikan pupuk subsidi di Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan analisis hasil *de-coupling games*: peran multi aktor dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di Luwu Utara, peneliti melihat bahwa terdapat beberapa kata penting yang sering muncul saat proses wawancara.

Gambar 1. Word Cloud Peran Multi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Luwu Utara



Sumber: Dokumentasi diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan gambar *words cloud* di atas, terdapat beberapa kata yang paling dominan, yaitu:

1. Kebijakan: kata ini sering muncul karena penelitian ini merujuk pada implementasi kebijakan ketahanan pangan, termasuk berbagai program dan pemisahan strategi yang digunakan oleh multi aktor di Kabupaten Luwu Utara.
2. Pangan: kata ini sering muncul karena kebijakan ketahanan pangan berfokus pada ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Hal ini menunjukkan bagaimana setiap aktor bekerja sama, berkolaborasi, berkoordinasi, dan berinteraksi untuk memastikan ketersediaan, distribusi, akses, pemanfaatan, konsumsi, dan keamanan pangan di Kabupaten Luwu Utara.
3. Aktor: kata ini merujuk pada berbagai pihak atau *stakeholders* yang terlibat dalam jaringan kebijakan ketahanan pangan. Aktor tersebut dari pemerintah, swasta, dan masyarakat yang memiliki peran, tugas, dan fungsi masing-masing. Aktor memiliki strategi, kepentingan, dan peran berbeda dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara.
4. Pelatihan: kata ini sering muncul sebagai peran dari Penyuluh Pertanian Lapangan dari Dinas Pertanian. Pelatihan dan penyuluhan kepada petani sebagai bagian penting dari upaya untuk mendukung kapasitas kelembagaan petani dan mendukung pertanian berkelanjutan.
5. Program: kata ini sering muncul karena kebijakan ketahanan pangan memiliki beberapa program yang mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Program tersebut seperti Gerakan Pasar Murah, Lumbung Pangan, dan Perkarangan Pangan Lestari di Kabupaten Luwu Utara, yang bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan ketahanan pangan.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa peran multi aktor dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara memiliki kepentingan dan fokus pada tugas dan fungsi masing-masing aktor. Pemisahan strategi dilakukan untuk menghindari adanya dinamika konflik atau persaingan, melainkan untuk meningkatkan kerja sama strategis dalam berkoordinasi dan berinteraksi mewujudkan ketahanan pangan. Pemisahan strategi ini tidak sejalan dengan temuan (Alwi & Susanti, 2021), yang menunjukkan bahwa program publik sering tidak efektif karena strategi aktor. Penerapan konsep *de-coupling games* ini diperlukan untuk memfasilitasi interaksi antar aktor pada level jaringan, supaya meningkatkan kerja sama yang strategis.

Kerja sama strategis dilakukan dengan melibatkan seluruh aktor. Keterlibatan masyarakat dan swasta yang bermitra dan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai dengan

strategi masing-masing dalam mewujudkan ketahanan pangan membuat implementasi kebijakan menjadi efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan penelitian (Taufik et al., 2021) dan (Apriyanto et al., 2023), yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dan dorongan dari Pemerintah Daerah terhadap keikutsertaan kelembagaan petani dan swasta dalam mewujudkan ketahanan pangan menjadi sebuah prioritas.

Pemisahan strategi pada peran multi aktor dalam menjalin kolaborasi dan koordinasi mewujudkan ketahanan pangan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Interdependensi antara aktor tidak terjadi secara langsung, melainkan saling ketergantungan menuntut adanya sinergitas antar aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian oleh (Azhar et al., 2023), yang menunjukkan bahwa hanya pemerintah yang menjadi kunci dalam pengelolaan pangan. Proses interaksi dalam mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara memerlukan kepercayaan, distribusi sumber daya dan informasi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Agustian et al., 2023), yang menunjukkan bahwa ketiga hal tersebut menjadi kunci jaringan dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara melibatkan peran multi-aktor dengan penerapan konsep *de-coupling games*. Pemerintah, swasta, dan masyarakat masing-masing memainkan peran strategis yang terpisah namun tetap berkolaborasi untuk mencapai ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan berfokus pada penyediaan program yang mendukung ketersediaan pangan seperti Lumbung Pangan dan Gerakan Pangan Murah, yang membantu menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi pangan yang adil, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani juga berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan melalui program diversifikasi pangan, seperti Pekarangan Pangan Lestari dan peningkatan produksi sagu sebagai alternatif pangan lokal. Selain itu, pendampingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Interaksi antara aktor pemerintah dan masyarakat menunjukkan adanya sinergi yang efektif dalam mendukung ketahanan pangan berbasis lokal.

Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan pupuk bersubsidi juga memainkan peran penting, dengan memastikan aksesibilitas pupuk bagi petani melalui proses distribusi yang transparan. Pemisahan strategi antar aktor memungkinkan setiap pihak untuk fokus pada tanggung jawab masing-masing, sehingga mengurangi potensi tumpang tindih kepentingan.

Secara keseluruhan, pendekatan *de-coupling games* berhasil diterapkan dengan baik, ditunjukkan oleh peningkatan indeks ketahanan pangan Kabupaten Luwu Utara. Sinergi dan kolaborasi antara berbagai aktor dalam jaringan kebijakan ketahanan pangan tidak hanya mendukung keberlanjutan pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Luwu Utara kedepannya.

Referensi

- Adhila Amalia, T., Aria Adibrata, J., & Ratna Setiawan, R. (2022). Strategi Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19: Penguatan Potensi Desa Melalui Sustainable Farming di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 129–140. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep>
- Agustian, D., Patiung, M., Rembu, Y., Nur, M., & Ode, S. (2023). Network Governance dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 63. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8225>
- Alwi. (2022). *Governance dan Kebijakan Publik*. UPT Unhas Press.
- Alwi, & Susanti, G. (2021). Policy Instrument for Effective Implementation of the Food Security Policy in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11(9).
- Apriyanto, M., Azhar, A., & Novyar Satriawan Fikri, K. (2023). Implementasi Program Aksi Ketahanan Pangan di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Selodang Mayang*, 9(1).
- Azhar, A. A., Hadiwijoyo, S. S., & Nau, N. U. W. (2023). Peran Multi-Aktor Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pengelolaan Food Loss and Waste di Indonesia. 2(4). <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i04>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Pustaka Pelajar.
- Crozier, M., & Friedberg, E. (1980). *Actors and systems; the politics of collective action*. University of Chicago Press.
- Hayati, N., Purwanto, R., & Kadir W, A. (2014). Preferensi Masyarakat Terhadap Makanan Berbahan Baku Sagu (Metroxilon Sagu Rottb) sebagai Alternatif Sumber Karbohidrat di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 11(1), 82–90. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2014.11.1.82-90>
- KemenPANRB. (2023, October 20). *Getar Dilan*. <https://jippnas.Menpan.Go.Id/>.
- Kickert, W., Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. (1997). *Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446217658>
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). *Governance Networks in the Public Sector* (First Published). Routledge.
- Klijn, E., Koppenjan, J., & Termeer, K. (1995). Managing Networks in The Public Sector: A Theoretical Study of Management Strategies in Policy Networks. *Public Administration*, 73(3), 437–454.
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (Third Edition). SAGE Publications, Inc.
- Pransuamitra, P. A. (2023). *Ketahanan Pangan RI di Bawah Rata-Rata Dunia, Begini Faktanya*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230516074542-128-437635/ketahanan-pangan-ri-di-bawah-rata-rata-dunia-begini-faktanya>
- Rhodes, R. A. W. (1981). *Control and Power in central- Local government relations*. Gower.
- Rukmana, N. S., Alwi, & Susanti, G. (2021). Managing Complexity and Resource-Based Strategy Cases in the Implementation of Food Security Policy in Indonesia. *Journal of Enviromental Treatment Techniques*, 8(4), 1618–1624.
- Scharpf, F. W. (1997). *Games real actors play; actor centred institutionalism in policy research*. Westview Press.

- Sorrentino, F., & Mecholsky, N. (2011). Stability of strategies in payoff-driven evolutionary games on networks. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science*, 21(3). <https://doi.org/10.1063/1.3613924>
- Taufik, A., Chaminra, T., Utami, I. R., Dzikra, A., Isnaad, P., Gaffar, D. E., & Rusman, M. (2021). Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi di Kabupaten Majene. *KYBERNOLOGY : Journal of Government Studies*, 1(2), 178–194.
- Torfin, J., Peters, B. G., Pierre, J., & Sorensen, E. (2012). *Interactive Governance: Advancing the Paradigm* (First Published). Oxford University Press.
- Voets, J., & De Rynck, F. (2011). Exploring the innovative capacity of intergovernmental network managers: the art of boundary scanning and boundary spanning. In *Innovation in The Public Sector*. https://doi.org/https://doi.org/10.1057/9780230307520_8